

DAMPAK EKONOMI IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM) PADA PERUM PERHUTANI UNIT II JAWA TIMUR

Theresia Avila *) & Bambang Suyadi **)

Abstract: *This research was conducted to determine the economic impact of the implementation program community based forest management (CBFM). This program collaboration between Institute Perhutani and local institutions (Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Petani Hutan Lestari which become as a partner. The purpose of this study was to determine the increase in income that is felt by the villagers Grajagan incorporated in Sustainable Forest Farmers LMDH. This research is a descriptive quantitative research. The place of the research is determined by using purposive area method and result Grajagan village as the location. Data collection of the research used interview, observation, and documents method. The results showed that the CBFM program Perhutani economic impact by increasing the income of rural communities in Grajagan. It is obtained from tumpang Sari system, the additional work in forestry so that people get an additional wage and also any profit sharing that can increase the income of rural communities.*

Keywords: *Community Based Forest Management/CBFM, tumpang Sari system, Forest Village Community Organization*

*) Theresia Avila adalah mahasiswa Prog. Studi Ekonomi FKIP UNEJ

**) Bambang suyadi adalah staf pengajar Prog. Studi Ekonomi FKIP UNEJ

PENDAHULUAN

Perum Perhutani merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan perencanaan, pengurusan, pengusahaan dan perlindungan hutan di wilayah kerjanya. Sehingga dituntut untuk memberikan perhatian yang besar kepada masalah sosial dan ekonomi, terutama masyarakat pedesaan yang sebagian besar tinggal disekitar hutan dan peduli pada masyarakat miskin disekitar hutan. Hal tersebut dilaksanakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa hutan, secara kelompok dan kelembagaan. Sesuai dengan visi dan misi perusahaan maka pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat desa hutan menjadi penting dan strategis sehingga perlu dimaknai, diwadahi, difasilitasi dalam program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

Pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat (PHBM) adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan dengan pola kolaborasi yang bersinergi antara Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan atau pihak yang berkepentingan dalam upaya mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan yang optimal. Dengan adanya program PHBM Perhutani manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh pihak-pihak terkait yang memiliki kepentingan dengan keberadaan hutan, dan utamanya adalah kepentingan masyarakat sekitar hutan. Hal tersebut dikarenakan pertanggungjawaban perusahaan salah satunya harus memperhatikan kondisi masyarakat sekitar perusahaan (Susanto, 2012: 10).

Sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) pertama kali dicanangkan oleh Perum Perhutani pada tahun 2001 yang membuka kesempatan bagi masyarakat desa hutan untuk terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan hutan. Saat ini pedoman pelaksanaan program tersebut mengacu pada SK Direksi Perum Perhutani No. 682/KPTS/DIR/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

Agar kegiatan PHBM dapat lebih terkoordinir, maka masyarakat desa hutan dihimpun dalam suatu lembaga yaitu Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Menurut Awang *et al.* (2008:13) lembaga tersebut dibentuk oleh masyarakat desa yang berada didalam atau disekitar hutan untuk mengatur dan memenuhi kebutuhannya melalui interaksi terhadap hutan dalam konteks sosial, ekonomi, politik dan budayayang berkepentingan dalam kerjasama pengelolaan

sumberdaya hutan, yang anggotanya berasal dari unsur lembaga desa dan atau masyarakat yang ada di desa tersebut yang mempunyai kepedulian terhadap sumber daya hutan. LMDH merupakan lembaga yang dibentuk oleh Perum Perhutani yang menjadi mitra kerja dan memiliki kedudukan sejajar dengan Perum Perhutani dalam pengelolaan sumber daya hutan.

Dengan adanya program PHBM Perum Perhutani masyarakat sekitar hutan dapat memperoleh manfaat secara ekonomi yaitu berupa pemenuhan kebutuhan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dimana dalam kegiatan PHBM masyarakat memperoleh pekerjaan dan mendapatkan upah yang sudah disesuaikan dengan sistem pembayaran yang ada di masyarakat. Selain itu adanya kegiatan tumpangsari yaitu dimana masyarakat sebagai pesanggem atau petani hutan diberikan lahan oleh Perum Perhutani secara gratis untuk dikelola menjadi lahan pertanian dan hasilnya sepenuhnya dimiliki oleh masyarakat.

Tetapi dalam pelaksanaan programnya masih terdapat kendala atau permasalahan salah satunya lokasi tumpangsari yang jauh mempersulit anggota LMDH untuk mencapai lokasi, kurangnya partisipasi masyarakat terhadap PHBM dan rendahnya pendidikan masyarakat atau anggota LMDH sehingga membuat program mengalami kendala.

Berdasarkan pemaparan diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dampak ekonomi dari pelaksanaan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) apakah program tersebut sudah memberikan manfaat secara ekonomi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di desa Grajagan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti menganalisis tentang dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat sekitar hutan dari implementasi program PHBM milik Perhutani. Analisis yang digunakan oleh peneliti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tempat penelitian menggunakan metode Purposive Area yaitu di desa Grajagan. Subjek dalam penelitian ini adalah anggota LMDH Petani Hutan Lestari. Data dalam penelitian ini diperoleh menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumen. Metode dokumentasi didapat dari data hasil wawancara yang dilakukan dengan informan utama dan informan tambahan. Informan utama

yaitu masyarakat yang tergabung dalam LMDH Petani Hutan Lestari. Data-data yang telah terkumpul nantinya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat desa Grajagan masih banyak belum bisa mencukupi kebutuhannya karena yang bekerja sebagai buruh tani. Tingkat pendidikan yang ditempuh masyarakat yang tidak tamat sekolah dasar mendominasi tingkat pendidikan masyarakat. Dengan pendidikan yang minim akan mempengaruhi mata pencaharian yang dimiliki. Dimana masyarakat Grajagan mata pencaharian yang mendominasi masyarakat yaitu pada sektor buruh tani sebanyak 5.265 orang dari 10.455 orang. Sehingga dapat diketahui banyak masyarakat di desa Grajagan yang berpenghasilan minim karena sebagian besar masyarakat bekerja sebagai buruh tani dan petani dengan lahan kecil. Dengan penghasilan yang minim maka mempengaruhi masyarakat untuk bisa mencukupi kebutuhannya.

Dalam program PHBM telah memberikan dampak dalam kehidupan masyarakat, dampak tersebut salah satunya berupa dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat secara langsung melalui implementasi program tersebut. Dampak ekonomi tersebut antara lain:

a. Peningkatan Penghasilan Masyarakat

Hal tersebut dikarenakan mata pencaharian masyarakat yang sebagian besar hanya menjadi buruh tani atau petani sehingga pendapatan yang diterima sangatlah minim. Namun dengan adanya kegiatan program PHBM yang dilakukan oleh masyarakat yang tergabung dalam LMDH Petani Hutan Lestari bisa menambah penghasilan guna pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Dengan adanya implementasi program tersebut telah memberikan dampak berupa peningkatan penghasilan masyarakat secara langsung. Peningkatan tersebut berasal dari adanya kegiatan tumpangsari. Peningkatan pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat berkisar antara 62,5% sampai 90,90% dimana peningkatan yang terjadi sangatlah besar dan mengindikasikan bahwa melalui program tersebut bisa memberikan dampak ekonomi terhadap peningkatan masyarakat.

b. Adanya Kesempatan Kerja

Dalam program PHBM masyarakat diberikan peluang mendapatkan pekerjaan baru yaitu dengan ikut serta dalam pekerjaan Perhutani. Di dalam kegiatan di dalam Perhutani masyarakat mendapatkan pekerjaan mulai dari kegiatan pemupukan, persemaian, perawatan tanaman, pembuatan acir, dan tebangan. Pekerjaan dalam Perhutani, masyarakat diberikan kesempatan memperoleh pekerjaan baru dan mendapatkan pengetahuan baru.

Setiap kegiatan yang dilakukan dengan pihak Perhutani sebelumnya, sudah dilakukan program kerja dan program kerja tersebut disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di dalam Perhutani. Dalam pekerjaan yang dilakukan oleh pihak LMDH jumlah anggota yang ikut bekerja disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Di dalam kegiatan tersebut masyarakat diberi upah sebesar Rp 50.000,00 per orang. Dimana upah tersebut sudah disesuaikan dengan sistem pembayaran yang ada dimasyarakat.

c. Bagi Hasil (Sharing)

Bagi hasil atau sharing di desa Grajagan paling banyak berasal dari produksi kayu terutama dari produksi kayu jati. Dalam sistem bagi hasil ini, Perhutani adalah pihak yang menentukan persentase bagi hasilnya. Peraturan ini berasal dari tingkat pusat (Direksi Perum Perhutani) sehingga di tingkat BKPH Curahjati hanya mengikuti aturan tersebut. Hasil sharing yang didapat harus dialokasikan untuk kas LMDH, iuran paguyuban, alokasi untuk pemerintah desa, alokasi untuk pengurus LMDH, dan kegiatan sosial sesuai AD/ART yang telah ditetapkan.

Perolehan yang didapat dari hasil sharing kayu sepenuhnya diserahkan pada LMDH untuk dialokasikan dalam bentuk kegiatan yang dilakukan dalam lembaga tersebut. Perolehan hasil sharing yang didapat maksimal 25% dari penjualan produksi kayu dan perolehan tersebut didapatkan setiap tahunnya yang diberikan secara rutin oleh pihak Perhutani. LMDH Petani Hutan Lestari telah mendapatkan bagi hasil atau sharing dari produksi kayu tahun 2013 sebesar Rp 26.159.952,00. Hasil dari sharing atau bagi hasil tersebut dipergunakan untuk

biaya operasional dari lembaga dan juga disalurkan untuk anggota dan kegiatan sosial yang sudah disesuaikan dengan AD/ART lembaga tersebut

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, dengan adanya PHBM yang dicetuskan pada tahun 2001 menunjukkan kepedulian Perhutani pada masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Berdasarkan data yang diperoleh dari subjek penelitian yaitu dampak ekonomi implementasi program PHBM menunjukkan program yang dijalankan oleh pihak Perum Perhutani mempunyai tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan programnya. Di BKPH Curahjati tahapan program tersebut sudah mengikuti aturanyang berlaku yaitu berdasarkan petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) mulai dari sosialisasi, pembentukan LMDH, pembentukan forum komunikasi, monitoring dan evaluasi.

Program PHBM merupakan sistem kolaborasi yang dilakukan oleh pihak Perhutani dan juga masyarakat sehingga keberadaan masyarakat dalam program sangatlah penting. Kebijakan pengelolaan hutan di Indonesia telah diarahkan untuk dilaksanakan dengan paradigma atau pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Sehingga dengan adanya hal tersebut masyarakat didorong untuk mempunyai peran lebih besar dan berarti dalam pengelolaan hutan. Dalam implementasi program PHBM Perhutani melibatkan LMDH yang mempunyaai peranan yang sangat penting dalam ketercapaian keberhasilannya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan manfaat yang diterima oleh masyarakat salah satunya berupa adanya kesempatan berpartisipasi untuk ikut mengelola hutan sehingga menerima manfaat bagi masyarakat. Menurut Zubaedi (2013:4) program dijalankan difokuskan pada upaya membantu masyarakat yang memiliki minat untuk bekerja sama dalam kelompok, melakukan identifikasi terhadap kebutuhan dan melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Program PHBM merupakan sarana yang tepat dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Dimana melalui program tersebut masyarakat desa hutan dapat memperoleh kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Kendala dalam program dirasakan oleh pihak Perhutani sebagai penyelenggara program. Salah satu kendala yang dialami oleh pihak Perhutani

yaitu rendahnya faktor sumber daya manusia yang ada. Sehingga menghambat ketercapaian program. Hal tersebut terjadi karena rendahnya pendidikan yang ditempuh masyarakat. Di dalam LMDH masih banyak pengurus dan anggota menempuh pendidikan hanya sampai bangku Sekolah Dasar (SD). Hal tersebut tentu saja mempengaruhi kelancaran program yang ada. Seperti rendahnya pendidikan mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap program yang dijalankan. Masyarakat yang kurang memahami program sehingga dapat mengakibatkan perbedaan pandangan tentang program yang dijalankan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Winata dan Yuliana (2011: 130), tingkat pengetahuan masyarakat petani atau nelayan berhubungan dengan perannya dalam suatu program kegiatan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti hal yang sama juga dirasakan oleh pihak masyarakat karena kendala yang selama ini ada di masyarakat adalah kurangnya sosialisasi dari pihak Perhutani. Hal tersebut mempengaruhi kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang program yang dijalankan sehingga masyarakat kurang berpartisipasi dalam program tersebut. Dengan adanya permasalahan tersebut menjadikan program yang dijalankan mengalami hambatan. Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan adanya sosialisasi dan pendampingan yang intensif dari pihak Perhutani.

Kegiatan-kegiatan tersebut disepakati bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat yang tergabung dalam LMDH. Kegiatan PHBM selain difokuskan untuk menjaga kelestarian hutan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya PHBM memberikan dampak ekonomi secara langsung berupa peningkatan pendapatan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Affianto dalam Winata dan Yuliana (2011: 90), dalam bahwa program PHBM melibatkan masyarakat desa sekitar hutan untuk mengelola hutan dan diharapkan masyarakat mendapatkan keuntungan dari sistem PHBM.

Dengan adanya program PHBM banyak kegiatan yang dilakukan dan memberikan manfaat secara ekonomi berupa peningkatan pendapatan masyarakat. Perolehan pendapatan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Kegiatan ekonomi dalam pelaksanaan program PHBM yaitu: kegiatan tumpangsari, dimana masyarakat diberikan kebebasan

dalam mengelola lahan di hutan untuk dijadikan lahan pertanian. Di desa Grajagan masyarakat yang merupakan pesanggem atau petani hutan menanam tanaman tumpangsari berupa palawija seperti kedelai dan jagung dan penanaman tanaman tumpangsari hanya bisa dilakukan dua kali dalam setahun dikarenakan faktor cuaca atau ketersediaan air di lahan.

Adanya kesempatan kerja, masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) mempunyai kesempatan untuk bekerja di dalam Perhutani. Pekerjaan yang dilakukan dengan LMDH sudah disepakati dengan adanya program kerja. Program kerja tersebut tentunya sudah disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan yang ada di perhutani. Pekerjaan yang dilakukan oleh anggota LMDH seperti penanaman, pemupukan, perawatan tanaman, pembuatan acir sampai tebang. Dengan kegiatan tersebut masyarakat tidak hanya memperoleh pendapatan atau upah kerja akan tetapi juga mendapatkan pengetahuan yang berhubungan dengan kehutanan.

PENUTUP

Kesimpulan

Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan program sosial kehutanan yang dibuat untuk mengatasi permasalahan sosial yang terjadi pada Perhutani. Dalam Implementasi program PHBM terdapat tahapan-tahapan program yang harus dilakukan yaitu pengenalan PHBM melalui sosialisasi kepada masyarakat dan pihak yang berkepentingan (stakeholder), pembentukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan, pembentukan Forum Komunikasi PHBM (FK PHBM) diberbagai tingkat dan selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi program yang digunakan untuk melihat kemajuan kegiatan, kemajuan LMDH dan dampak pelaksanaan PHBM.

Dalam pelaksanaan program PHBM dilakukan oleh Perhutani dan juga masyarakat desa hutan melalui wadah yaitu Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Dalam pelaksanaan PHBM masyarakat mendapatkan manfaat secara ekonomi. Hal tersebut diperoleh dengan adanya kegiatan yang ada di dalam program seperti adanya kegiatan tumpangsari. Melalui kegiatan tumpangsari masyarakat diberikan mengelola lahan untuk dijadikan lahan pertanian dan hasil yang didapat secara keseluruhan dimiliki oleh masyarakat. Adanya kegiatan di

dalam perhutani seperti kegiatan penanaman, pemupukan dan juga tebangan yang memberikan manfaat dimana masyarakat dapat memperoleh pekerjaan di perhutani dan mereka mendapatkan upah kerja dalam kegiatan tersebut. Kegiatan bagi hasil atau sharing yang diperoleh dari hasil tebangan. Sehingga dengan adanya kegiatan PHBM sangatlah bermanfaat karena secara ekonomi mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Saran

Dengan adanya program PHBM ini seharusnya masyarakat lebih banyak proaktif dalam program. Karena masih banyak anggota LMDH yang bersifat pasif terhadap program. Permasalahan yang terjadi pada rendahnya tingkat sumber daya manusia seharusnya dapat diatasi dengan adanya bentuk pelatihan yang rutin dari pihak Perhutani sendiri. Karena memang banyak masyarakat yang tergabung dalam LMDH tingkat pendidikan masih rendah. Selain itu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program ini seharusnya dilakukan sosialisasi lagi karena anggota yang bersifat pasif tersebut kurang mengetahui program yang dijalankan dan kurang mengetahui manfaatnya bagi mereka. Selain hal tersebut seharusnya pemerintah memberikan dukungan bagi adanya program tersebut karena manfaatnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Awang, *et al.* 2008. *Panduan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)*. Jakarta: Harapan Prima.
- Rachmadi, H.S. 2010. *Peyempurnaan: Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)*. Surabaya: Perum Perhutani Unit II Jawa Timur.
- Susanto, A. B. 2012. *Reputation – Driven Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Erlangga.
- Winata, A. dan Yuliana, E. 2012. *Tingkat Partisipasi Petani Hutan dalam Progam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perhutani*. Jurnal MIMBAR, Vol. XXVIII, No. 1 (6) : 65-76.
- Zubaedi, 2013. *Pengembangan Masyarakat (Wacana dan Praktik)*. Jakarta: Kencana.